

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MK RI, 2006).

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary 4th Edition, ST. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968.

Djaja, Ermansjah. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Fakrullah, Zudan Arif. Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian). (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia). (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015).

Lembaga Pengkajian Independen dan Kebijakan Publik (LPIKP). Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Redi, Ahmad. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Soehino, Ilmu Negara. (Yogyakarta: Liberty, 2013).

Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI-Press, 1986).

Jurnal

Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State’s Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum. Januari 2014, Jilid 43. No. 1, halaman 1-8.

Dewanto, Wisnu Aryo. “Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia.” Opinio Juris. Januari-April 2012, Vol. 4, halaman 18-32.

Hiariej, Eddy O.S. “*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Mimbar Hukum. Februari 2019, Vol. 31 No. 1. 2019, halaman 113-125.

Hutahaean, Armunanto dan Indarti, Erlyn, “Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)”, Masalah-Masalah Hukum. Juli 2020, Jilid 49 No. 3, Juli 2020, halaman 314-323.

Jessie B. dan Matthew J., *Corruption and Marginalisation*. Transparency International, 2.

Nurtjahjo, Hendra. “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara.” Jurnal Hukum dan Pembangunan. September 2005, Tahun Ke-35. No. 1, halaman 275-287.

Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”. Humanus. Vol. 15, No.1, 2015, halaman 80-91.

Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”. Mimbar Hukum. Februari 2009, Vol. 21. No. 1, halaman 155-170.

Tesis

Trisulo, Evy. 2012. *Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, *Tesis*. Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus Dari 57 (lima puluh tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 01 Tahun 2020, 115/M.PPN/HK/12/2020, 356-4666 Tahun 2020, 7 Tahun 2020, 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.

Lain-lain

Ditipidkor Bareskrim Polri. 2018. Telaahan Staf tentang penguatan organisasi direktorat tindak pidana korupsi bareskrim polri dengan nivellering kasubbagops dan kasubbagrenmin. <https://zi.tipidkorpolti.info/wp-content/uploads/2019/08/TELAAHAN-STAF-2018-BAG-RUBAH.pdf>. 31 Maret 2022.

Humas Polri. 2022. ASN Polri Eks Pegawai KPK Mulai Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi. https://humas.polri.go.id/idn/systems/page/detail_berita.aspx?id_berita=10

15705&ref=undefined&judul=ASN%20Polri%20Eks%20Pegawai%20KPK
%20Mulai%20Bertugas%20di%20Satgas%20Pencegahan%20Korupsi. 31
Maret 2022.

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>. 1 Oktober 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia. 2017. Kejaksaan Cegah Korupsi Melalui TP4.
<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=11506>. 1 April 2022.

Kementerian PPN/Bappenas. 2018. Siaran Pers TIM NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI BERSINERGI TINGKATKAN CAPAIAN UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI. <https://old.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/tim-nasional-pencegahan-korupsi-bersinergi-tingkatkan-capaian-upaya-pencegahan-korups/>. 9 Maret 2022.

Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan IV Tahun 2021, (Jakarta, Sekretariat
Nasional Pencegahan Korupsi, 2022).

Terjemahan UNCAC hasil Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja
Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi.
<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>. 19
Maret 2022.